JEMSI: Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi
E-ISSN: 2686-5238
P-ISSN: 2686-4916
https://dinastirev.org/JEMSI dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455
**DOI:** https://doi.org/10.38035/jemsi.v7i3
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
**Received:** 09 Desember 2025 | **Revised:** 30 Desember 2025 | **Accepted:** 16 Januari 2026

# Analisis Inventarisasi Barang Milik Negara pada Satuan Kerja Sekretariat Dukungan Kabinet

**Sendy Santika[1], R Luki Karunia[2]**
[1]Politeknik STIA LAN, Jakarta, Indonesia, sendy1388@gmail.com
[2]Politeknik STIA LAN, Jakarta, Indonesia, luki@stialan.ac.id

Corresponding Author: sendy1388@gmail.com[1]

***Abstract:*** *State Assets Inventory is a critical component of government asset management, ensuring data accuracy, legal certainty, and accountability. This study aims to analyze the implementation of State Assets inventory at the Cabinet Support Secretariat (Setdukab) based on physical and juridical aspects, and to identify necessary improvement measures. A qualitative approach was employed through in-depth interviews, field observations, and document reviews. The findings indicate that the State Assets inventory process at Setdukab has not been optimally implemented. In the physical aspect, discrepancies were identified between physical conditions and system records, inconsistencies in asset labeling, inaccurate reporting of asset conditions, and suboptimal room arrangement that hinders verification. In the juridical aspect, the issuance of the Inventory Team Decree was often delayed, several assets lacked a formal Usage Status Determination, and asset ownership documents, although generally available, had not been fully digitized. This study recommends strengthening internal regulations, improving inventory-related Standard Operating Procedures, digitizing legal documents, and enhancing internal controls to improve the reliability of State Assets data and reduce recurring audit findings.*

***Keywords:*** *Inventory, State Assets, Asset Management.*

**Abstrak:** Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) merupakan bagian krusial dalam penatausahaan aset pemerintah untuk memastikan akurasi data, kepastian hukum, dan akuntabilitas pengelolaan barang. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan inventarisasi BMN pada Sekretariat Dukungan Kabinet (Setdukab) berdasarkan aspek fisik dan yuridis serta mengidentifikasi langkah perbaikan yang diperlukan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inventarisasi BMN di Setdukab belum berjalan optimal. Pada aspek fisik ditemukan ketidaksesuaian antara data fisik dan sistem, ketidaktertiban labelisasi, ketidakakuratan pencatatan kondisi barang, serta penataan ruang yang belum mendukung proses verifikasi. Pada aspek yuridis diketahui bahwa SK Tim Inventarisasi sering terlambat diterbitkan bahkan tidak terbit, sebagian aset belum memiliki Penetapan Status Penggunaan (PSP), dan pengelolaan dokumen kepemilikan belum terdigitalisasi dengan baik. Penelitian ini merekomendasikan penyempurnaan regulasi internal, perbaikan SOP

inventarisasi, digitalisasi dokumen, serta penguatan pengendalian internal untuk meningkatkan keandalan data BMN dan mengurangi temuan berulang dalam pemeriksaan eksternal.

**Kata Kunci:** Inventarisasi, BMN, Penatausahaan Aset.

## PENDAHULUAN

Pengelolaan BMN merupakan bagian penting dari tata kelola keuangan negara yang bertujuan menjamin akurasi data aset, kepastian hukum, dan akuntabilitas pelaporan. Inventarisasi BMN menjadi salah satu tahapan utama dalam siklus penatausahaan yang berfungsi memastikan kesesuaian antara kondisi fisik aset dan pencatatannya dalam sistem. Kementerian dan lembaga diwajibkan melaksanakan inventarisasi secara berkelanjutan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN. Pelaksanaan inventarisasi yang tertib tidak hanya berkontribusi pada ketersediaan data aset yang andal, tetapi juga mendukung penguatan pengendalian internal dan perbaikan manajemen aset pemerintah.

Meskipun demikian, berbagai laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan bahwa permasalahan dalam inventarisasi BMN masih banyak ditemukan, antara lain ketidaksesuaian data fisik dengan sistem, ketidaklengkapan dokumen yuridis, ketidaktertiban labelisasi, serta lemahnya pembaruan data kondisi barang. Berbagai temuan tersebut menandakan adanya kelemahan dalam koordinasi, pengawasan internal, dan tata kelola administrasi aset pada instansi pemerintah. Permasalahan yang sama juga tercermin pada Setdukab sebagaimana ditunjukkan oleh temuan audit dan hasil evaluasi Indeks Pengelolaan Aset (IPA), yang mengindikasikan perlunya perbaikan dalam pelaksanaan inventarisasi BMN. Berikut data nilai IPA Setdukab selama 3 tahun terakhir:

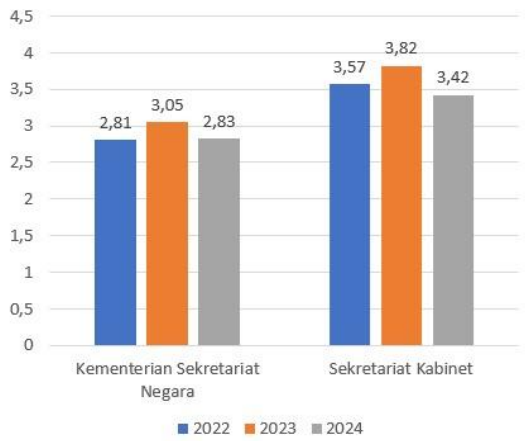


Sumber: Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan

**Gambar 1. Nilai IPA Sekretariat Dukungan Kabinet Tahun 2022-2024**

Kondisi pada gambar di atas menunjukkan bahwa Setdukab mengalami penurununan nilai IPA yang cukup signifikan pada tahun 2024. Hal ini karena pelaksanaan inventarisasi BMN di Setdukab belum optimal. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan inventarisasi BMN di Setdukab, baik dari aspek fisik maupun yuridis. Penelitian ini bertujuan: (1) menganalisis tingkat kesesuaian data fisik dengan sistem BMN; (2) mengidentifikasi permasalahan administratif dan legal, termasuk penerbitan Surat Keputusan (SK) Tim Inventarisasi, kelengkapan PSP, dan pengelolaan dokumen kepemilikan; serta (3) merumuskan

langkah-langkah perbaikan inventarisasi agar sesuai dengan ketentuan regulasi dan praktik pengelolaan aset yang baik.

Penelitian ini didukung oleh teori manajemen aset sektor publik, teori pengendalian internal (COSO *Framework*), dan konsep sistem informasi akuntansi yang menekankan integrasi data dan keandalan informasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penguatan literatur penatausahaan aset negara, serta menjadi dasar rekomendasi kebijakan untuk peningkatan kualitas pengelolaan BMN pada instansi pemerintah.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis pelaksanaan inventarisasi BMN pada Setdukab. Informan ditentukan melalui *purposive sampling* yang mencakup Kepala Biro Umum, Kepala Bagian BMN, Kepala Subbagian Penatausahaan BMN, operator aset, staf pengguna barang, dan auditor ahli muda.

Menurut Sugiyono (2017) pengumpulan data bisa memakai sumber primer dan sekunder. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, serta telaah dokumen meliputi data BMN pada aplikasi SAKTI/SIMAN, SK Tim Inventarisasi, PSP, dokumen kepemilikan, dan temuan BPK. Analisis data dilakukan menggunakan analisis tematik, dimulai dengan reduksi data, kategorisasi, hingga penarikan tema utama terkait aspek fisik dan yuridis inventarisasi BMN. Validitas data diuji melalui triangulasi sumber dan teknik guna memastikan konsistensi dan kredibilitas temuan.

Metode ini digunakan untuk menghasilkan pemahaman komprehensif mengenai permasalahan inventarisasi BMN dan merumuskan langkah perbaikan yang relevan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil observasi menunjukkan bahwa inventarisasi BMN di Setdukab masih menghadapi permasalahan kesesuaian data. Beberapa barang tidak ditemukan pada lokasi yang tercatat dalam aplikasi SAKTI/SIMAN, sementara sebagian lainnya berpindah tempat tanpa pelaporan. Hal ini mengonfirmasi pernyataan informan bahwa pelaporan mutasi barang belum berjalan sesuai prosedur. Temuan tersebut sejalan dengan hasil audit BPK yang menilai bahwa keandalan penyajian data aset Setdukab masih perlu diperbaiki. Berikut hasil sampling perbandingan data fisik dengan sistem pada Setdukab:

**Tabel 1. Sampling Perbandingan Data Fisik dengan Sistem**

| No. | Nama Barang | Jumlah (Fisik) | Jumlah (Sistem) | Kesesuaian Lokasi | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Laptop | 119 unit | 122 unit | Tidak sesuai | 3unit tidak diketahui keberadaannya |
| 2. | *Extenal Harddisk* | 50 unit | 66 unit | Tidak sesuai | 16unit tidak diketahui keberadaannya |
| 3. | Mobil | 10 unit | 10 unit | Sesuai | - |
| 4. | *Scanner* | 60 unit | 61 unit | Tidak sesuai | 1unit tidak diketahui keberadaannya |
| 5. | Pompa Air | 5 unit | 5 unit | Sesuai | - |

Sumber: Data Diolah Peneliti

Pada tabel di atas menunjukkan masih terdapat ketidaksesuaian antara data fisik dengan sistem, karena belum menjalankan prossedur dengna baik. Penelitian menemukan juga labelisasi barang belum dilaksanakan secara konsisten. Sejumlah barang tidak memiliki label, label pudar, atau tidak sesuai dengan nomor register. Kondisi ini menyulitkan proses

pencocokan fisik dan meningkatkan risiko kesalahan pencatatan. Ketidaktertiban labelisasi menjadi salah satu penyebab utama ketidaksesuaian fisik dengan sistem. Sebagian barang dalam kondisi rusak juga belum dilaporkan sehingga data sistem tidak mencerminkan kondisi riil. Penataan ruang yang tidak standar, seperti bercampurnya barang kantor dengan barang pribadi pegawai, juga menyebabkan proses inventarisasi berlangsung tidak efektif. Ketidaktertiban ini menunjukkan lemahnya pengawasan internal dan kurangnya pemahaman unit pengguna tentang kewajiban pelaporan kondisi dan lokasi barang.

SK Tim Inventarisasi tidak selalu terbit sebelum kegiatan inventarisasi dimulai. Kondisi tersebut menyebabkan kegiatan inventarisasi berjalan tanpa dasar hukum formal. Hal ini melanggar ketentuan PMK 181/2016 dan menjadi salah satu temuan berulang BPK. Sebagian aset di Setdukab belum memiliki PSP, terutama aset lama dan aset hasil pengadaan yang dokumentasinya tidak lengkap. Tanpa PSP, status penguasaan barang tidak memiliki landasan hukum yang kuat, sehingga berpotensi menghambat proses penghapusan maupun pengamanan aset. Dokumen kepemilikan aset pada dasarnya tersedia, namun pengelolaannya belum terdigitalisasi. Arsip fisik yang belum tertata rapi berpotensi memunculkan kesulitan verifikasi dan risiko kehilangan dokumen di masa mendatang.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kelemahan inventarisasi BMN di Setdukab bersifat sistemik, mencakup aspek fisik, administratif, dan hukum. Ketidaksesuaian data fisik dengan sistem disebabkan oleh lemahnya pelaporan mutasi barang, tidak adanya standar labelisasi modern, serta penataan ruang yang tidak konsisten. Sementara itu, aspek yuridis menghadapi tantangan berupa ketidaktertiban dokumen administratif seperti SK Tim Inventarisasi dan PSP.

Kondisi ini sejalan dengan teori pengendalian internal (COSO), yang menekankan pentingnya aktivitas pengendalian, informasi, dan komunikasi dalam mendukung tata kelola aset. Selain itu, teori sistem informasi akuntansi menjelaskan bahwa keandalan data aset sangat ditentukan oleh integrasi dan pemutakhiran informasi secara berkala. Dalam konteks ini, inventarisasi BMN di Setdukab belum mencerminkan penerapan prinsip-prinsip tersebut secara optimal.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan pentingnya perbaikan pada proses inventarisasi, baik melalui pembaruan SOP, digitalisasi dokumen, penguatan pengawasan internal, maupun pengembangan sistem pelaporan yang lebih responsif. Pembahasan ini memperkuat argumentasi bahwa peningkatan kualitas inventarisasi BMN tidak hanya memenuhi kebutuhan pelaporan, tetapi juga merupakan bagian dari reformasi pengelolaan aset pemerintah.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan inventarisasi BMN di Setdukab belum berjalan optimal, baik pada aspek fisik maupun yuridis. Pada aspek fisik, ditemukan ketidaksesuaian antara data fisik dan sistem, ketidaktertiban labelisasi, pelaporan kondisi barang yang belum konsisten, serta penataan ruang yang belum mendukung proses verifikasi aset. Sementara itu, pada aspek yuridis masih terdapat keterlambatan penerbitan atau tidak terbit SK Tim Inventarisasi, ketidaklengkapan PSP, dan pengelolaan dokumen kepemilikan yang belum terdigitalisasi.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa permasalahan inventarisasi BMN bersumber dari lemahnya pengendalian internal dan ketidaktertiban administrasi. Perbaikan diperlukan melalui pembaruan regulasi dan SOP, peningkatan disiplin pelaporan, digitalisasi dokumen, serta penguatan koordinasi antarunit agar akurasi data aset dan kepastian hukum penguasaan BMN dapat terjamin.

## REFERENSI

Ainiyah, G. Z., *et. al.* (2021). Efektivitas Implementasi Kebijakan Penatausahaan Barang Milik Negara pada Balai Litbangkes Banjarnegara. *Perwira Journal of Economics and Business*, Vol. 1, No. 1.

Amaliah, *et. al*. (2019). Pengaruh Penatausahaan Barang Milik Negara dan Penerapan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. JAWARA: Jurnal Wawasan dan Riset Akuntansi, Vol. 6, No. 2, Hal. 120-131.

Amiri. (2015). Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Secara *Akuntable* Menuju *Good Governance*. Potret Pemikiran, Vol. 20, No. 2, Hal. 31-44.

Barnawi, dan Arifin, M. (2012). Manajemen Sarana dan Prasarana Sekolah. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Dunn, N. W. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Terjemahan E. K. Abdurrahman). Yogyakarta: Gadjah Mada *University Press*.

Karambut, *et. al*. (2019). Evaluasi Penatausahaan Barang Milik Negara Melalui Penggunaan Aplikasi SIMAK-BMN Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Manado. *Going Concern*: Jurnal Riset Akuntansi, Vol. 14, No. 2, Hal. 237-242.

Karunia, Luki, R., dan Ibrahim, Malik, M. (2021). Pelaksanaan Inventariasasi Aset Tetap di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. *Journal of Business Administration Economic & Entrepreneurship*, Vol. 3, No. 2.

Kuswarak, *et. al.* (2022). Analisis Sistem Pengelolaan Barang Milik Negara Pada Kantor Satuan Kerja Pelaksana Jaringan Sumber Air Mesuji Sekampung di Lampung. Jurnal Manajemen Mandiri Saburai, Vol. 06, No. 01.

Laudon, K. C., dan Laudon, J. P. (2014). *Management Information Systems: Managing The Digital Firm (13th ed.)*. Pearson Education.

Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.

Miles, M. M., *et. al*. (2014). *Qualitative Data Analysis a Methods Sourcebook Edition 3*. USA: *Sage Publication*.

Moleong, J., Lexy. (2002). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Nugroho, A. (2019). Perencanaan Sistem Inventarisasi Alat dan Barang Laboratorium Universitas Amikom Yogyakarta. INFOS Journal: Information System Journal, Vol. 2, No. 1.

Pinem, S., dan Pakpahan, V. M. (2020). Aplikasi Inventarisasi Aset Berbasis Web dengan Metode Waterfall. Jurnal Informatika Universitas Pamulang, Vol. 5, No. 2.

Pohan. (2007). Metodologi Penelitian Pendidikan. Yogyakarta: Ar-Rijal *Institute*.

Ramdany, dan Setiawati, Y. (2021). Analisis Penatausahaan Aset Tetap Barang Milik Negara (BMN). Jurnal Akuntansi, Vol. 10, No. 2.

Rosmawati, S., dan Marianah, N. (2023). Manajemen Penatausahaan Aset Tetap pada Kantor Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Batang Hari. JIUBJ: Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari, Vol. 23, No. 1, Hal. 299-304.

Sahetapy. (2022). Kinerja Pegawai Dalam Pengelolaan Barang Milik Negara di Badan Pengelolaan Keuangn dan Aset Daerah Provinsi Maluku. *Journal Administration and Public Service*, Vo. 3, No. 1.

Siregar, D. D. (2004). Manajemen Aset: Pengelolaan dan Optimalisasi Aset dalam Organisasi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Sugiama, A. G. (2013). Manajemen Aset Pariwisata. Guardaya Intimarta.

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Trinindita, *et. al*. (2022). Analisis Efektifitas Pengelolaan Inventarisasi Aset Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung. *Prosiding The 13th Industrial Research Workshop and National Seminar*.

Tumilantouw, K., et. al. (2024). Analisis Penatausahaan Inventarisasi Barang Milik Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 pada Bapenda Kota Manado. Jurnal Riset Akuntansi dan Portfolio Investasi, Vol. 2, No. 2.

Yanto, F., dan Muammar, S. (2021). Pengaruh Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) Terhadap Efektivitas Pengelolaan Aset Negara pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh Bireuen. Jurnal Kebangsaan,